



Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Good Governance yang Dimediasi oleh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor)

Diki Susanto¹, Bambang Pamungkas², David H.M. Hasibuan³

^{1,2,3}Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor

E-mail: diki.susanto@gmail.com¹; pamungkas@ibik.ac.id²;
davidhasibuan@ibik.ac.id³

Abstract

This study aims to analyze the role of regional financial management accountability as a mediator between the accessibility of regional financial reports and regional financial accounting systems in relation to good governance in the Regional Apparatus Organizations of Bogor City. Utilizing a quantitative approach, this study employs Structural Equation Modeling (SEM) with the assistance of PLS and IBM Statistics SPSS 26.0 programs for data analysis. The research sample consists of 108 respondents who are employees meeting specific criteria within the Regional Apparatus Organizations of Bogor City. Data collection was conducted through questionnaire distribution to these respondents. The analysis results indicate that regional financial management accountability plays a significant role in mediating the relationship between the accessibility of regional financial reports and regional financial accounting systems towards good governance. These findings suggest that improving the accessibility of financial reports and enhancing regional financial accounting systems can promote the establishment of good governance through increased accountability in financial management. This research provides an important contribution to understanding the factors influencing the realization of good governance at the regional government level and can serve as a reference for policymakers in formulating strategies to improve the quality of governance, particularly in aspects of regional financial management in Bogor City and other regions in Indonesia.

Keywords: Accountability; Good Governance; Financial Report Accessibility.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai mediator antara aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap *good governance* di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Menggunakan pendekatan kuantitatif, studi ini menerapkan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan program PLS dan IBM Statistics SPSS 26.0 untuk analisis data. Sampel penelitian terdiri dari 108 responden yang merupakan pegawai dengan kriteria tertentu di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki peran signifikan dalam memediasi hubungan antara aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan

daerah terhadap *good governance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aksesibilitas laporan keuangan dan perbaikan sistem akuntansi keuangan daerah dapat mendorong terciptanya *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya *good governance* di tingkat pemerintahan daerah dan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah di Kota Bogor dan daerah lainnya di Indonesia.

Kata-kata Kunci: Akuntabilitas; Tata Kelola Baik; Aksesibilitas Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Gelombang reformasi dan otonomi daerah telah membawa angin segar dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.¹ Masyarakat kini semakin lantang menyuarakan tuntutan akan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab khususnya dalam urusan pengelolaan keuangan daerah.² Merespons gema perubahan ini, pemerintah telah meletakkan landasan hukum melalui UU No. 23/2014 dan PP No. 12/2019, menggariskan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan fiskal daerah.

Bagaikan sebuah orkestra, pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan harmonisasi berbagai elemen. Dari ketepatan waktu yang presisi layaknya metronom, hingga efisiensi yang tajam bagai pisau bedah, setiap aspek memainkan perannya dalam menciptakan simfoni tata kelola yang memukau. Konsep *value for money* menjadi partitur utama, menuntun setiap nada pengeluaran untuk menghasilkan melodi kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat.³

Namun, di balik layar panggung yang gemerlap, Kota Bogor masih bergulat dengan beberapa sumbang nada.⁴ Temuan BPK yang menghadiahi opini “wajar dengan pengecualian” menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju sempurna masih panjang.

¹ Reza Cahya Anggraini dan Saiful Anwar, “Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Kelurahan dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Akuntabilitas,” *Journal of Economic, Bussines and Accounting* 7, no. 1 (2023): 1622–1631, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/6305>.

² Yulens Frits Bonai, Syaikhul Falah, dan Sylvia Christina Daat, “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen,” *Jurnal Akuntansi, Audit dan Aset (AAA)* 2, no. 1 (2019): 1–24, <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/AAA/article/view/1919>.

³ Asrida, Meinarni Asnawi, dan Syaikhul Fallah, “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua,” *Keuda: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* 3, no. 1 (2018): 1–16, <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/710>.

⁴ Dewi Mantasari, Arfianty, dan Fatimah, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa pada Pengelolaan Dana Desa di Kec. Suppa Kab. Pinrang,” *Decision: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2023): 106–114, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/decision/article/view/2133>.

Kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan regulasi menjadi batu sandungan yang harus disingkirkan.

Dalam drama perbaikan ini, akuntabilitas dan transparansi memegang peran protagonis.⁵ Ibarat jendela kaca yang bening, pemerintah daerah dituntut untuk membuka lebar akses informasi keuangan kepada publik. Sistem akuntansi keuangan daerah bukan sekadar mesin hitung, melainkan cermin yang memantulkan realitas fiskal daerah dengan jernih dan akurat.⁶

Pemerintah Kota Bogor, layaknya seorang maestro yang terus mengasah kemampuan, telah menunjukkan tekadnya untuk meningkatkan performa.⁷ Namun, seperti pepatah “Roma tidak dibangun dalam semalam,” upaya penyempurnaan ini membutuhkan konsistensi dan inovasi berkelanjutan. Pengembangan *platform digital* yang ramah pengguna dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi nada-nada baru yang perlu dikomposisikan.⁸

Studi lebih lanjut tentang interaksi antara akuntabilitas, aksesibilitas informasi, dan sistem akuntansi dalam membentuk *good governance* menjadi penting.⁹ Bagaikan peta untuk para penjelajah, hasil penelitian semacam ini dapat menjadi panduan berharga bagi pemerintah daerah dalam menavigasi lautan kompleksitas tata kelola keuangan.¹⁰

Perjalanan menuju *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah bukanlah sprint singkat, melainkan maraton panjang yang membutuhkan stamina dan determinasi.¹¹

⁵ Nur Fitri Dewi, “Peran Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Keuangan,” *Jurnal Profiet* 5, no. 1 (2024): 290–301, <https://ojs.stiepi.ac.id/index.php/profiet/article/view/136>.

⁶ Nur Fitri Dewi, “Determinan Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok,” *Jamer: Jurnal Akuntansi Merdeka* 4, no. 2 (2023): 84–91, <https://jamer.unmermadiun.ac.id/index.php/jamer/article/view/103>.

⁷ Christina Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka,” *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas* 8, no. 1 (2020): 19–27, <https://ejournal.undana.ac.id/JAK/article/view/2363>.

⁸ Ida Kurnia Putri, “Peranan Atribut Destinasi Wisata dalam Meningkatkan Revisit Intention yang Dimediasi oleh Kepuasan Pengunjung pada Wisata Geopark Merangin, Jambi,” *JCS: Journal of Comprehensive Science* 2, no. 8 (2023): 1303–1310, <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/478>.

⁹ Yunanti Eva Mandasari, Tubagus Ahmad Darajat, dan Nunung Nurhasanah, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022,” *Costing: Journal of Economic, Bussines and Accounting* 7, no. 4 (2024): 2597–5234, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/11237>.

¹⁰ Winda Ningsih dan Windi Ariesti Anggraeni, “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Pemediasi,” *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* 4, no. 3 (2023): 602–619, <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/7635>.

¹¹ Sigit Prabawa, Herman Karamoy, dan Lidia Mawikere, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Good Governance (Studi Empiris di Kabupaten Minahasa),” *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15, no. 2 (2020): 269–278, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/28232>.

Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah kemajuan yang patut diapresiasi. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan, impian akan tata kelola keuangan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat bukanlah fatamorgana belaka, melainkan oasis yang bisa diraih.¹²

Dalam kanvas besar pembangunan nasional, pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah lukisan indah yang terus dipahat, warna demi warna, untuk menciptakan potret Indonesia yang makmur dan berkeadilan.¹³ Setiap daerah, termasuk Kota Bogor, memiliki kuas di tangan mereka untuk turut melukis masa depan yang cerah ini.¹⁴

Temuan-temuan penelitian ini bukan sekadar tinta di atas kertas. Mereka adalah benih-benih perubahan yang, jika ditanam dengan bijak, dapat menumbuhkan hutan lebat tata kelola keuangan yang sehat di Kota Bogor. Bagi Pemerintah Kota Bogor, hasil studi ini bagaikan peta harta karun, menunjukkan jalan menuju kebijakan dan strategi yang dapat mengubah wajah pengelolaan keuangan daerah.

Dengan pendekatan holistik ini, mimpi tentang pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat bukan lagi fatamorgana di padang pasir birokrasi. Ini adalah visi yang dapat dan harus diwujudkan. Karena pada akhirnya, tata kelola keuangan yang baik bukan hanya tentang angka-angka yang seimbang, tapi tentang kehidupan yang lebih baik bagi setiap warga.

Kota Bogor, dengan langkah-langkah strategis berdasarkan temuan penelitian ini, memiliki kesempatan untuk menjadi mercusuar bagi daerah-daerah lain. Sebuah contoh nyata bahwa dengan komitmen, inovasi, dan kolaborasi, transformasi pengelolaan keuangan daerah bukan hanya mungkin - tapi juga dapat membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam upaya mengungkap misteri tata kelola keuangan daerah yang efektif, tim peneliti memulai sebuah ekspedisi ilmiah di jantung birokrasi Kota Bogor. Bersenjatakan

¹² Nadia Athiqotul Amalia Rizal dan Suwardi Bambang Hermanto, "The role of organizational commitment mediates the effect of leadership style and competence on village government accountability," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8, no. 1 (2019): 2–16.

¹³ Fien Hapsari Somad et al., "Pengaruh Penyajian, Aksesibilitas dan Transparansi Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD pada Pemerintah Kota Lhokseumawe," *JAM: Jurnal Akuntansi Malikussaleh* 2, no. 2 (2023): 202–222, <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jam/article/view/11866>.

¹⁴ Superdi, M. Rasuli, dan Alfiati Silfi, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung)," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi* 4, no. 1 (2017): 215–2029, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/13398>.

kacamata positivisme dan palu empirisme, mereka mengetuk pintu realitas dengan pendekatan kuantitatif yang terukur dan terstruktur.¹⁵

Layaknya penjelajah yang memilih rute terbaik, tim ini menggunakan kompas purposive sampling untuk memilih 108 responden dari 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Para pemandu ini bukanlah sembarang pegawai, melainkan mereka yang memiliki ‘peta mental’ terbaik tentang seluk-beluk keuangan daerah.

Alat utama dalam ekspedisi ini adalah kuesioner - bukan sekadar lembar pertanyaan, melainkan jendela ke alam pikiran para responden.¹⁶ Dengan skala Likert sebagai teropongnya, tim peneliti mengukur ‘cuaca’ sikap dan persepsi, dari badai ketidaksetujuan (skor 1) hingga cerah-ceria persetujuan penuh (skor 5).

Untuk mengolah ‘harta karun’ data yang terkumpul, tim menggunakan teknologi canggih bernama *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). Ibarat mesin pencari emas modern, SEM-PLS ini mampu menyaring butiran-butiran berharga informasi dari tumpukan data yang kompleks.¹⁷

Evaluasi model dilakukan dalam dua babak. Pertama, *outer model* - seperti memeriksa ketahanan tenda sebelum berkemah - menguji kekuatan hubungan antara variabel laten dan indikatornya. Kedua, *inner model* - ibarat memeriksa kompas untuk memastikan arah yang benar - menilai akurasi model struktural melalui koefisien determinasi (R^2).

Hipotesis diuji dengan ketat, menggunakan uji statistik t dengan batas kritis 1,96, setiap hipotesis harus membuktikan dirinya lebih tangguh dari badai ketidakpastian statistik.

Metodologi ini dirancang bukan hanya untuk menghasilkan data, tapi untuk menggali wawasan yang kuat dan dapat diandalkan. Seperti peta harta karun yang teliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memandu para pengambil kebijakan dalam menavigasi lautan kompleksitas tata kelola keuangan daerah.

¹⁵ Suhadarliyah et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023).

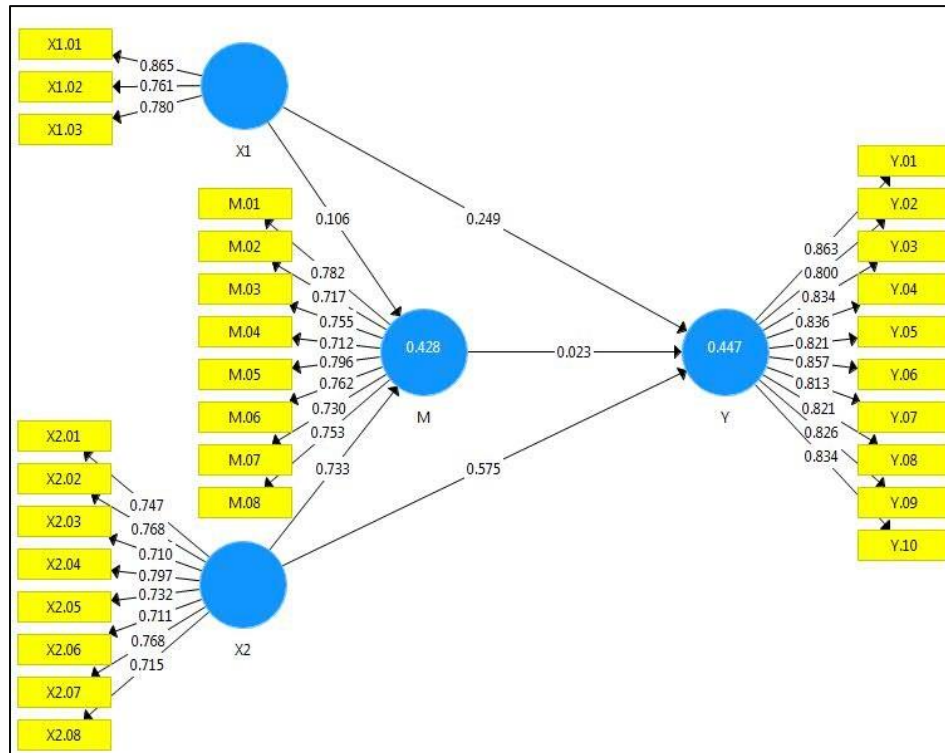
¹⁶ Miftah Amir, Fatra Syahlan, dan Derry Nugraha, “The Effect of Social Media Use on Personality and Student Discipline,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati* 5, no. 1 (2024): 174–176, <https://jurnal.pcmkramatjati.or.id/index.php/JIPMUKJT/article/view/206>.

¹⁷ Dian Muslimin et al., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*, ed. Rantika, Cetakan 1. (Pilubang: CV. Lauk Puyu Press, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji validitas konstruk yang terdiri dari uji diskriminan dan uji validitas konvergen merupakan cara yang dilakukan dalam Analisi *Outer Model*. *Loading factor* yang diperoleh > 0,5 yang ditunjukkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Kalkulasi Model SEM-PLS

Selanjutnya analisis yang dilakukan meliputi Koefisien Determinan (R^2), analisis pengaruh langsung dan analisis pengaruh tidak langsung.

Tabel 1. Nilai R^2 (*R-Square*)

Variabel	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>	Indikasi Model
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (M)	0,428	0,417	<i>Weak</i> (Lemah)
<i>Good Governance</i> (Y)	0,447	0,431	<i>Weak</i> (Lemah)

Dalam sebuah upaya untuk memahami dinamika tata kelola pemerintahan di Kota Bogor, para peneliti telah melakukan analisis mendalam yang mengungkapkan beberapa temuan menarik. Bayangkan kita sedang menelusuri sebuah peta kompleks yang menggambarkan hubungan antara berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pemerintahan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bisa kita anggap sebagai ‘jantung’ dari sistem ini, dipengaruhi oleh dua faktor utama: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan itu sendiri dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah. Menariknya, kedua faktor ini bersama-sama membentuk sekitar 42,8% dari keseluruhan gambaran akuntabilitas. Ini seperti menyusun puzzle, di mana kita sudah memiliki hampir setengah bagiannya, namun masih ada banyak potongan lain yang perlu ditemukan untuk melengkapi gambar utuhnya.

Selanjutnya, ketika kita melihat pada *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, kita menemukan sesuatu yang lebih menjanjikan. Tiga elemen utama - Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah - bersama-sama membentuk 44,7% dari gambaran *Good Governance*. Ini menunjukkan bahwa model yang digunakan cukup kuat dalam menjelaskan bagaimana tata kelola yang baik terbentuk. Bayangkan ini seperti fondasi yang kokoh untuk sebuah bangunan - meskipun bukan keseluruhan struktur, tapi cukup kuat untuk menopang dan memberi bentuk pada keseluruhan bangunan.

Yang menarik, penelitian ini juga mengungkap bahwa hubungan antar variabel tidak selalu searah. Ada yang positif, artinya ketika satu aspek meningkat, aspek lainnya juga ikut meningkat. Namun, ada juga hubungan yang negatif, di mana peningkatan satu aspek justru menurunkan aspek lainnya. Ini menggambarkan kompleksitas dalam tata kelola pemerintahan, di mana tidak ada solusi ‘satu ukuran untuk semua’.

Terakhir, dan mungkin yang paling menggembirakan, adalah temuan bahwa semua jalur hubungan antar variabel terbukti signifikan secara statistik. Ini seperti mendapatkan stempel persetujuan yang menegaskan bahwa hubungan-hubungan yang kita temukan bukan kebetulan semata, melainkan pola yang dapat diandalkan.

Tabel 2. Hasil Analisis Pengaruh Langsung

<i>Path</i> (Jalur)	Original Sample (<i>Path</i>)	T-Statistics	P-Values	Keputusan
X1 -> M	0,106	2,838	0.006	Positif
X2 -> M	0,633	3,171	0.002	Positif
X1 -> Y	0,251	9,443	0.000	Positif
X2 -> Y	0,589	8,412	0.000	Positif
M -> Y	0,223	3,225	0.002	Positif

Keterangan: X1 (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah); X2 (Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah); M (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah); dan Y (*Good Governance*)

Analisis berikutnya adalah analisis pengaruh tidak langsung berdasarkan Diagram Jalur model yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan *software* SmartPLS.

Tabel 3. Hasil Analisis Pengaruh Tidak Langsung

<i>Path</i> (Jalur)	Original Sample (<i>Path</i>)	T- Statistics	P-Values	Keputusan
X1 -> M -> Y	0,102	3,164	0,002	Positif
X2 -> M -> Y	0,114	3,221	0,005	Positif

Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3, jalur tidak langsung menunjukkan hubungan positif. Hubungan antara variabel laten endogen dan eksogen adalah positif, atau searah.

PEMBAHASAN

Ningsih menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan meningkatkan upaya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.¹⁸ Penelitian oleh Mandasari dkk juga menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan meningkatkan dan sangat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.¹⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh tingkat aksesibilitas laporan keuangan daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah sangat penting untuk menyampaikan informasi tentang operasi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini membantu mencapai transparansi dan akuntabilitas publik. Pemerintah daerah harus memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan mereka untuk mendukung pelaksanaan akuntabilitas keuangan.

Superdi menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memengaruhi akuntabilitas laporan keuangan daerah.²⁰ Sebaliknya, Mandasari dkk. menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.²¹ Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap *Good Governance*

Adanya akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara adalah salah satu ciri pemerintahan yang baik. Akuntabilitas muncul karena kebutuhan, menurut Prabawa dan

¹⁸ Ningsih dan Windi Ariesti Anggraeni, “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Pemediasi.”

¹⁹ Mandasari, Tubagus Ahmad Darajat, dan Nunung Nurhasanah, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022.”

²⁰ Superdi, M. Rasuli, dan Alfiati Silfi, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung).”

²¹ Mandasari, Tubagus Ahmad Darajat, dan Nunung Nurhasanah, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022.”

Mawikere,²² hal ini menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas. Tidak dapat disangkal bahwa istilah ini telah menjadi jargon yang umum dan tuntutan akan akuntabilitas telah menjadi topik yang sering dibicarakan oleh siswa, masyarakat awam, swasta, dan berbagai lembaga negara dan non-pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap pemerintahan yang baik.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap *Good Governance*

Hasil pengujian yang dilakukan dengan software SmartPLS menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan memengaruhi kualitas pemerintahan di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Melalui penyediaan laporan keuangan yang mudah diakses untuk semua pihak yang berkepentingan, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat secara terbuka dan jujur. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, karena salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah membuat laporan keuangan yang baik mudah diakses. Akibatnya, aksesibilitas laporan keuangan berdampak pada kualitas pemerintahan yang baik.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap *Good Governance*

Hasil pengujian yang dilakukan dengan software SmartPLS menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memengaruhi kualitas pemerintahan di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Sistem akuntabilitas keuangan daerah adalah salah satu bukti pemerintahan yang baik. Sistem akuntansi keuangan daerah mengatur operasi akuntansi penerimaan. Sistem ini mencakup pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, dan pelaporan, baik secara manual maupun komputerisasi, tentang pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran lain yang berkaitan dengan keuangan daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas keuangan daerah memengaruhi kualitas pemerintahan yang baik.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Memediasi dari Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap *Good Governance*

Di tengah hiruk-pikuk Kota Bogor yang semakin berkembang, sebuah studi menarik telah mengungkap rahasia di balik tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Penelitian ini, yang menggunakan perangkat lunak canggih SmartPLS, telah membuka tabir hubungan antara tiga elemen kunci: aksesibilitas laporan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan *good governance* itu sendiri.

²² Prabawa, Herman Karamoy, dan Lidia Mawikere, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Good Governance (Studi Empiris di Kabupaten Minahasa)."

Bayangkan sebuah jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakatnya. Jembatan ini adalah aksesibilitas laporan keuangan daerah. Semakin kokoh dan lebar jembatan ini, semakin mudah masyarakat melihat dan memahami bagaimana uang mereka dikelola. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk bersikap terbuka dan jujur.

Namun, jembatan saja tidaklah cukup. Di sinilah peran akuntabilitas pengelolaan keuangan muncul sebagai penjaga yang setia. Ia memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa penjaga ini, jembatan aksesibilitas mungkin hanya akan menjadi monumen tanpa makna.

Studi ini mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga berperan sebagai mediator yang cerdas. Ia menjembatani pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap terwujudnya *good governance*. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi katalis yang memperkuat dampak positif dari keterbukaan informasi keuangan.

Temuan ini bagaikan menemukan kunci master untuk membuka pintu menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Bogor. Ia mengingatkan kita bahwa *good governance* bukan sekadar slogan, melainkan hasil dari sinergi antara keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang konsisten.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Memediasi dari Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap *Good Governance*

Di jantung Kota Bogor yang terus berdetak dengan dinamika pemerintahan, sebuah temuan penting telah menyibak tirai tentang bagaimana kualitas pemerintahan terbentuk. Penelitian ini mengungkap peran krusial sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bayangkan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai sebuah mesin canggih yang mengolah dan menyajikan informasi keuangan. Mesin ini bukan sekadar alat pencatat, melainkan juga pembawa pesan tentang bagaimana roda pemerintahan berputar dari sisi finansial. Setiap angka yang dihasilkan adalah cerminan dari kinerja dan operasional pemerintah daerah, membuka jendela transparansi bagi publik untuk mengintip ke dalam.

Namun, mesin secanggih apapun membutuhkan operator yang handal. Di sinilah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mengambil peran sebagai sang operator. Ia tidak hanya memastikan mesin berjalan dengan baik, tetapi juga menerjemahkan setiap *output* menjadi bahasa yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Studi ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah bertindak sebagai jembatan penghubung. Ia menjadi mediator yang menguatkan pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap terwujudnya pemerintahan yang berkualitas di Kota Bogor. Ibarat seorang penerjemah ulung, akuntabilitas mengubah bahasa angka menjadi narasi kepercayaan publik.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Hapsari dan Salima, yang menyoroti betapa sistem akuntansi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan menjadi pilar penyangga akuntabilitas. Mereka bagai tiga serangkai yang tak terpisahkan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik.²³

Pesan yang tersirat dari penelitian ini jelas: pemerintah daerah perlu terus mempertajam sistem pencatatan dan pelaporannya. Ini bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan langkah strategis menuju pelaksanaan akuntabilitas keuangan yang lebih kokoh. Setiap perbaikan dalam sistem ini adalah investasi langsung pada kualitas pemerintahan.

Pada akhirnya, narasi ini menggarisbawahi sebuah kebenaran fundamental: pemerintahan yang baik di Kota Bogor tidak hanya dibangun di atas fondasi sistem yang canggih, tetapi juga dijaga oleh semangat akuntabilitas yang tinggi. Keduanya, bersama-sama, menciptakan simfoni tata kelola yang harmonis, di mana setiap nada transparansi dan akuntabilitas mengalun indah, mengundang kepercayaan dan partisipasi publik dalam orkestra demokrasi lokal.

KESIMPULAN

Temuan-temuan penelitian ini seperti sebuah *puzzle* yang akhirnya tersusun sempurna, mengungkap gambaran besar tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* terbentuk di Kota Bogor. 1). Aksesibilitas laporan keuangan daerah ternyata memiliki dampak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Bayangkan ini seperti membuka jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya transparansi menerangi setiap sudut pengelolaan keuangan. 2). Sistem akuntansi keuangan daerah juga berperan penting dalam membentuk akuntabilitas. Ini seperti memiliki mesin canggih yang tidak hanya mencatat, tapi juga memastikan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan. 3). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti menjadi pilar utama dalam mewujudkan *good governance*. Ini adalah jembatan emas yang menghubungkan praktik

²³ Tanti Prita Hapsari dan Siti Salima, "Efikasi Diri Generasi Milenial dan Keputusan Berwirausaha di Bidang Ekonomi Kreatif," *Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis* 28, no. 1 (2023): 30–38, <https://jurnal.uns.ac.id/kewirausahaan-dan-bisnis/article/view/67405>.

keuangan yang baik dengan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. 4). Aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh langsung terhadap *good governance*. Seolah-olah, dengan membuka buku keuangan untuk dilihat publik, pemerintah secara otomatis melangkah menuju tata kelola yang lebih baik. 5). Sistem akuntansi keuangan daerah juga memberikan dampak langsung pada *good governance*. Ini menunjukkan bahwa fondasi teknis yang kuat dalam pengelolaan keuangan adalah kunci menuju pemerintahan yang baik. 6). Yang menarik, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah bertindak sebagai mediator antara aksesibilitas laporan keuangan dan *good governance*. Ini seperti sebuah katalis yang memperkuat dampak keterbukaan informasi terhadap kualitas pemerintahan. 7). Terakhir, akuntabilitas juga memediasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap *good governance*. Ini menegaskan peran sentral akuntabilitas sebagai penerjemah praktik keuangan yang baik menjadi tata kelola yang unggul.

REFERENSI

- Amir, Miftah, Fatra Syahlan, dan Derry Nugraha. "The Effect of Social Media Use on Personality and Student Discipline." *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati* 5, no. 1 (2024): 174–176. <https://jurnal.pcmkramatjati.or.id/index.php/JIPMUKJT/article/view/206>.
- Anggraini, Reza Cahya, dan Saiful Anwar. "Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Kelurahan dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Akuntabilitas." *Journal of Economic, Bussines and Accounting* 7, no. 1 (2023): 1622–1631. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/6305>.
- Asrida, Meinarni Asnawi, dan Syaikhul Fallah. "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua." *Keuda: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* 3, no. 1 (2018): 1–16. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/710>.
- Bonai, Yulens Frits, Syaikhul Falah, dan Sylvia Christina Daat. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen." *Jurnal Akuntansi, Audit dan Aset (AAA)* 2, no. 1 (2019): 1–24. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/AAA/article/view/1919>.
- Dewi, Nur Fitri. "Determinan Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok." *Jamer: Jurnal Akuntansi Merdeka* 4, no. 2 (2023): 84–91. <https://jamer.unmermadiun.ac.id/index.php/jamer/article/view/103>.
- . "Peran Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Keuangan." *Jurnal Profiet* 5, no. 1 (2024): 290–301. <https://ojs.stiepi.ac.id/index.php/profiet/article/view/136>.

- Garung, Christina Yunnita, dan Linda Lomi Ga. “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.” *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas* 8, no. 1 (2020): 19–27. <https://ejurnal.undana.ac.id/JAK/article/view/2363>.
- Hapsari, Tanti Prita, dan Siti Salima. “Efikasi Diri Generasi Milenial dan Keputusan Berwirausaha di Bidang Ekonomi Kreatif.” *Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis* 28, no. 1 (2023): 30–38. <https://jurnal.uns.ac.id/kewirausahaan-dan-bisnis/article/view/67405>.
- Mandasari, Yunanti Eva, Tubagus Ahmad Darajat, dan Nunung Nurhasanah. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022.” *Costing: Journal of Economic, Bussines and Accounting* 7, no. 4 (2024): 2597–5234. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/11237>.
- Mantasari, Dewi, Arfianty, dan Fatimah. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa pada Pengelolaan Dana Desa di Kec. Suppa Kab. Pinrang.” *Decision: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2023): 106–114. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/decision/article/view/2133>.
- Muslimin, Dian, Zumhur Alamin, Defirra Alizunna, Risna Nur Ainia, Firza Agung Prakoso, Randitha Missouri, Masita, et al. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*. Diedit oleh Rantika. Cetakan 1. Pilubang: CV. Lauk Puyu Press, 2024.
- Ningsih, Winda, dan Windi Ariesti Anggraeni. “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Pemediasi.” *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* 4, no. 3 (2023): 602–619. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/7635>.
- Prabawa, Sigit, Herman Karamoy, dan Lidia Mawikere. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Good Governance (Studi Empiris di Kabupaten Minahasa).” *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15, no. 2 (2020): 269–278. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/28232>.
- Putri, Ida Kurnia. “Peranan Atribut Destinasi Wisata dalam Meningkatkan Revisit Intention yang Dimediasi oleh Kepuasan Pengunjung pada Wisata Geopark Merangin, Jambi.” *JCS: Journal of Comprehensive Science* 2, no. 8 (2023): 1303–1310. <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/478>.
- Rizal, Nadia Athiqotul Amalia, dan Suwardi Bambang Hermanto. “The role of organizational commitment mediates the effect of leadership style and competence on village government accountability.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8, no. 1 (2019): 2–16.
- Somad, Fien Hapsari, Naz’aina, Muammar Khaddafi, dan Razif. “Pengaruh Penyajian, Aksebilitas dan Transparansi Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.” *JAM: Jurnal Akuntansi Malikussaleh* 2, no. 2 (2023): 202–222. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jam/article/view/11866>.
- Suhadarliyah, Suryani Hartati, Zaenurrosyid, Dahlia Amelia, Balla Wahyu Budiarto, Yoseb Boari, Subur Manullang, dan A. Besse Dahliana. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.

Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Superdi, M. Rasuli, dan Alfiati Silfi. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung).” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi* 4, no. 1 (2017): 215–2029. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/13398>.